



Pemerintah Kabupaten
Kutai Timur

RENJA

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

TAHUN ANGGARAN 2024



KATA PENGANTAR

Renja Kerja (RENJA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 merupakan dasar atau acuan memasukkan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024. Selain itu, Renja merupakan alat untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga bisa diketahui sejauh mana realisasi capaian kinerja RENJA bisa selaras dan berkesinambungan dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) Tahunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Mengingat arti strategis dokumen Renja dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan pemerintah daerah, maka dalam proses penyusunan hingga penetapannya mengikuti tata cara dan alur penyusunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu sehingga dokumen RENJA ini dapat diselesaikan tepat waktu.

Sangatta, 2024

Kepala Dinas ,



H. Ahmad Iip Makruf, ST.,MT.
NIP 19720418 199803 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) OPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja OPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dokumen Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2024 dibuat berdasarkan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman periode tahun 2021-2026. Disamping itu, Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman harus terintegrasi dengan prioritas dan fokus pembangunan daerah tahun 2024, bersinergi dengan prioritas pembangunan Nasional dan Provinsi Kalimantan Timur, serta harus menjadikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan 2024 dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan dokumen RKPD dan RENJA OPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya.

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA OPD, yang menitikberatkan

pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan OPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Kutai Timur.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, RKPD yang dilanjutkan dengan RENJA OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA OPD berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Dalam rangka penyusunan Rencana Kerja tahun 2024 sebagai bagian dari ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP), sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 310);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015-2035;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 27 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008 Nomor 27);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 37).

1.3 Maksud dan Tujuan

Secara umum, maksud penyusunan Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk satu tahun mendatang. Secara khusus Rencana Kerja ini mempunyai tujuan:

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berdasarkan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan hasil Musrenbang RKPD untuk melaksanakan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

2. Menjadikan Renja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
3. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dan penganggaran tahunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
4. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta indikator kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun depan.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Kerja

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja OPD, proses penyusunan Renja OPD, keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen RKPD, Renstra OPD dengan Renja K/L dan Renja Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja OPD

1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja OPD, serta susunan garis besar isi Dokumen

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU (2023)

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra OPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu, dan realisasi Renstra OPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan :

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD;

- f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan. Jika OPD yang bersangkutan belum mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap OPD perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan OPD yang bersangkutan.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD Berisikan uraian mengenai :

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD.
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals);
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD;
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dlm perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Berisikan uraian mengenai :

- a. Membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi dan lainnya.

Deskripsi yang disajikan dalam subbab ini, antara lain :

- Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/ kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut di peroleh;
- Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD

BAB IV : RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Berisi penjelasan mengenai :

- Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan
- Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan
- Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/ kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.
- Tabel rencana program dan kegiatan

BAB V : PENUTUP

Berisikan uraian berupa:

- Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU (TAHUN 2023)

Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur Tahun 2023 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur Tahun meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

2.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2023, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur memberikan kontribusi terhadap pencapaian kebijakan prioritas pembangunan daerah yaitu Meningkatkan Infrastruktur Dasar yang Berkualitas Secara Merata dengan uraian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan 8 kegiatan;
2. Program Pengembangan Perumahan, dengan 2 kegiatan;
3. Program Kawasan Permukiman dengan 1 kegiatan;
4. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, dengan 1 kegiatan;
5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU), dengan 1 kegiatan;
6. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan 1 Kegiatan;
7. UPT Pertamanan dan Pemakaman Sangatta Utara, dengan 5 kegiatan.
8. UPT Pertamanan dan Pemakaman Sangatta Selatan, dengan 4 kegiatan.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur tahun anggaran 2023. Dari 6 program dan 14

kegiatan dan 2 UPT pada tahun anggaran 2023, bisa kita lihat dari laporan pengawasan realisasi anggaran dengan data terlampir.

Tabel 2.1
Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2023

Data Terlampir

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Analisis kajian dilakukan terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja Disperkim , hasil analisis pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bisa kita lihat dari tabel 2.2 sebagai berikut :

Tabel 2.2

Indikator Kinerja Program dan Capaian Kinerja Program Dinas PERKIM Kabupaten Kutai Timur Tahun 2021 - 2026

No	Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021	2023		2024		2025		2026						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
1	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					122,710,983,809		108,165,648,822		111,550,134,439		113,421,063,216		115,368,220,181			
1.04	PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PERMUKIMAN																
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Rasio Pemukiman Layak Huni Lokasi Rawan Bencana															
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Areal Kawasan Kumuh	3.00%	6.00%	0.08%		0.08%		0.08%		0.08%		0.08%				
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Rasio Rumah Layak Huni diluar kawasan kumuh >10 ha	0.2472	0.2479	0.2486		0.2490		0.2493		0.24942		0.24943				
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM	Proporsi Panjang Jalan Lingkungan Kondisi Baik	0.145	0.1595	0.1914		0.22968		0.27562		0.33074		0.39689				
		Cakupan Rumah Tangga yang mengakses air minum yang layak dan berkelanjutan skala tematik berbasis masyarakat	51.99%	52.36%	52.76%		53.13%		53.52%		53.86%		54.19%				
		Persentase rumah tangga yang terlayani prasarana dan sarana air limbah domestik layak skala Komunal dan Individual	57.65%	57.74%	58.07%		58.39%		58.69%		58.97%		59.24%				
		Persentase drainase lingkungan dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	12.933%	14.226%	17.071%		20.485%		24.583%		29.499%		35.399%				
		Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan	13.705%	15.076%	18.091%		21.709%		26.051%		31.262%		37.514%				

RENJA DINAS PERKIM TAHUN 2024

No	Bidang Urusan Pemerintahan & Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program & Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2020	2021	2023		2024		2025		2026						
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Aman yang didukung dengan PSU															
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN, SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan Penerbitan Ijin Pengembangan	57.143%	62.857%			69.143%		76.057%		83.663%		92.029%				
1.04.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																

Sumber : Dinas Perkim 2022 data diolah

Capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur sampai dengan tahun ditunjukkan melalui Jumlah sarana dan prasarana serta infrastruktur yang telah di bangun di bidang masing-masing serta melibatkan partisipasi Masyarakat. Dokumen hasil pelaksanaan baik sarana dan prasaran serta infrastruktur, pada prinsipnya menggambarkan kualitas proses pelaksanaan pembangunan yang semakin meningkat selama dua tahun terakhir.

Pelayanan Kinerja pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada tabel 2.3 Sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kutai Timur

No	Program	Indikator	Target 2023	Capaian 2023	Pagu	Realisasi	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Keuangan	100%	100%	21.899.630.078	18.884.887.244	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	0.98 %	0%	3.500.000.000	1.225.481.776	
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	22%	23,0%	473.601.028.204	440.971.582.933	
4	ROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Presentase Jumlah Unit RTLH	0.2490 %	0.2449%	17.902.358.988	16.807.824.634	
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	21%	23%	656.587.360.000	623.731.809.552	
6	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	TERLAKSANANYA PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	69.14 %	70.59%	100.000.000	61.520.513	
No	Program	Hambatan/Pendorong					Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Belum adanya SK Bupati tentang penerima bantuan perbaikan rumah pasca bencana yang dikoordinir oleh BPBD Kabupaten Kutai Timur.					Hambatan
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Target tahun 2023 sebesar 22% dengan capaian pelaksanaan 23%					Pendorong
4	ROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Target tahun 2023 sebesar 0,2490% dengan capaian pelaksanaan 0,2449% (Indikator Bersifat Negatif, semakin kecil persentasenya semakin baik)					Pendorong
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Target tahun 2023 sebesar 21% dengan capaian pelaksanaan 23%					Pendorong
6	PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN	Target tahun 2023 sebesar 69,14% dengan capaian pelaksanaan 70.59%					Pendorong
No	Program	Permasalahan Realisasi Anggaran					Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Beberapa Perjalanan Dinas Tidak Terealisasi dan sisa dari perjalanan dinas (Penginapan, transportasi dan tiket pesawat)					
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Kegiatan tetap dilaksanakan untuk Verifikasi Data Korban Banjir					
3	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Sisa kontrak (Silpa kegiatan)					
4	ROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Sisa kontrak (Silpa kegiatan)					
5	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Sisa kontrak (Silpa kegiatan)					
6	PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI,	Silpa Kegiatan					

Sumber : Data diolah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 2023

2.3. Isu – Isu Strategis Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.

Pada bagian perumusan isi-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mengemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi oleh dinas berdasarkan identifikasi permasalahan, telaah Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati, serta telaahan Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur.

Adapun Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur dalam hal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

1. Perubahan Nomenklatur OPD dan SOTK OPD mengakibatkan beberapa kegiatan berbenturan dengan OPD lainnya sehingga harus dilakukan rekonsiliasi dan koordinasi terlebih dahulu. Proses transisi dari OPD lama yang memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman berakibat sedikit terhambatnya proses penyusunan rencana kerja OPD.
2. Belum tersedianya Rencana Pengembangan Kawasan Perumahan dan Permukiman juga menjadi kendala dalam penyusunan dan perhitungan kebutuhan rumah layak huni yang harus disediakan oleh OPD.
3. Belum tersedianya database terkait penanganan Penyediaan dan Rehabilitasi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota yang menjadi SPM (Standar Pelayanan Minimal) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
4. Belum optimalnya penanganan perumahan pasca bencana;
5. Kebijakan terkait kegiatan sertifikasi registrasi yang belum terlaksana;
6. Belum adanya payung hukum terkait Pola Penganggaran Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Kabupaten;
7. Penanganan rumah layak huni belum berkesinambungan.
8. Masih terdapatnya kawasan kumuh khususnya di perkotaan.
9. Belum memadainya sanitasi di wilayah permukiman.
10. Belum tersedianya pemakaman yang dikelola oleh pemerintah.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Setelah dilakukan penyusunan rancangan awal RKPD, terdapat proses analisis dan penyesuaian antara rancangan awal RKPD dengan hasil musyawarah perencanaan pembangunan. Hal tersebut menjadi pertimbangan dalam penyesuaian RKPD antara lain usulan dan masukan dari Bappeda, Pemerintah Kabupaten/Kota di Kabupaten Kutai Timur, OPD lain, dan masyarakat melalui rangkaian proses Musrenbang tersebut. Dari hasil musrenbang tersebut maka telah direkapitulasi seluruh usulan yang sesuai dengan tupoksi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Adapun rancangan awal RKPD Tahun 2024 tersebut bisa kita lihat dari tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2.5
Rancangan Awal RKPD 2024

“Terlampir”

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .

Telaah terhadap kebijakan nasional oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur dilakukan dengan mengkaji Rencana Strategis (Renstra) Kementerian. Hal ini diperlukan untuk mengetahui fokus kinerja kementerian dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Adapun yang terkait dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah Renstra Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Renstra Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

RANCANGAN RENSTRA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2020-2024

Indonesia diproyeksikan menjadi negara berpendapatan tinggi dan menjadi peringkat kelima negara dengan PDB terbesar di dunia pada tahun 2045. Untuk mewujudkan Visi Indonesia 2045 tersebut ditetapkan empat pilar pembangunan yang terdiri dari:

- a. Pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- c. Pemerataan pembangunan;
- d. Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Pilar ketiga ***“Pemerataan Pembangunan”*** tersebut diimplementasikan salah satunya melalui ***“Pembangunan Infrastruktur yang Merata dan Terintegrasi”***, di mana pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mewujudkan konektivitas antar wilayah secara fisik dan virtual, menyediakan

layanan dasar bagi masyarakat, menciptakan pemerataan pembangunan dan memperkuat ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim.

Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2017 Tentang Panduan Pembangunan Budaya Integritas Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, telah ditetapkan sasaran pembangunan PUPR berupa *Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030* yaitu sebagai berikut :

- a. Bendungan multifungsi untuk memenuhi kapasitas tampung 120 m³/kapita/tahun;
- b. Jalan 99% mantap yang terintegrasi antar moda dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya material lokal dan menggunakan teknologi *recycle*;
- c. 100% *Smartliving* (Hunian Cerdas).

Untuk mewujudkan Visium Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2030 tersebut terutama yang terkait dengan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dicapai melalui tahapan sebagai berikut:

a). Tahun 2017 – 2019 :

- ✓ 78% Pelayanan Air Minum, ***menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 1,5% (menjadi 27.000 ha)***, dan 75% Pelayanan Sanitasi. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp.45 Triliun;
- ✓ ***Backlog rumah bagi MBR sebesar 6,46 juta unit***, dicapai melalui pembangunan sebesar 814 ribu unit. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp.165 Triliun melalui 17% APBN/APBD dan 83% Swasta/Masyarakat.

b). Tahun 2020 – 2024 :

- ✓ 88% Pelayanan Air Minum, ***menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 2,6% (menjadi 17.000 ha)***, dan 85% Pelayanan Sanitasi. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp.128 Triliun;
- ✓ ***Backlog rumah bagi MBR sebesar 5 juta unit***, dicapai melalui pembangunan sebesar 3,9 juta unit. Jumlah anggaran yang dibutuhkan

sebesar Rp.780 Triliun melalui 20%-30% APBN/APBD dan 70%-80% Swasta/Masyarakat.

c). **Tahun 2025 – 2030 :**

- ✓ 100% Pelayanan Air Minum, *menurunkan luas permukiman kumuh perkotaan 4,4% (menjadi 0 ha)*, dan 100% Pelayanan Sanitasi. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp.170 Triliun;
- ✓ *Zero Backlog rumah bagi MBR 3 juta unit*, dicapai melalui pembangunan sebesar 4,88 juta unit. Jumlah anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp.1.220 Triliun melalui 20%-30% APBN/APBD dan 70%-80% Swasta/Masyarakat.

Berdasarkan kondisi, potensi dan permasalahan serta tantangan yang akan dihadapi pada periode 2020 – 2024, ditetapkan Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yaitu **“Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang Andal, Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”**

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

- a. Memberikan dukungan teknis dan administratif yang responsif kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- b. *Menyelenggarakan pembangunan, pelayanan dan pengelolaan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang andal dan terpadu dengan pengembangan wilayah serta memperhatikan kelestarian lingkungan.*
- c. Menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yang berkualitas dan pengembangan inovasi penyelenggaraan pembangunan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- d. Meningkatkan profesionalisme SDM Aparatur, efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pelaksanaan Visi dan Misi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka pencapaian tujuan sebagai berikut :

- a. Peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses serta pemanfaatan air untuk memenuhi kebutuhan domestic, peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan energi, industry dan sektor ekonomi unggulan.
- b. Peningkatan kelancaran konektivitas dan akses jalan yang lebih merata bagi peningkatan pelayanan system logistik nasional yang lebih efisien dan penguatan daya saing.
- c. Peningkatan permukiman berkualitas yang semakin merata dengan pemanfaatan dan pengelolaan yang partisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
- d. Pemenuhan kebutuhan perumahan yang semakin merata untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- e. Peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai dengan potensi dan upaya pengembangan wilayah pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis.
- f. Peningkatan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan yang terbangun dan terkelola dengan berbagai skema pembiayaan yang lebih efisien dan berkelanjutan.
- g. Peningkatan daya saing jasa konstruksi nasional serta peningkatan mutu, keselamatan, keamanan dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan hasil jasa konstruksi.
- h. Peningkatan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang bersih dan terpercaya.
- i. Peningkatan SDM aparatur Kementerian PUPR yang berkinerja tinggi
- j. Peningkatan efektifitas penyelenggaraan pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan hal tersebut maka, arah kebijakan 2020-2024 yang tertuang dalam RPJP pada RPJM ke-4 ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Dimana terdapat 4 (empat) pilar RPJMN IV tahun 2020 – 2024 yaitu:

1. Kelembagaan politik dan hukum yang mantap;
2. Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat;
3. Struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh;
4. Terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga.

Keberadaan 4 (empat) pilar dari RPJMN ke IV tahun 2020 – 2024 merupakan fokus utama yang diarahkan oleh RPJP Nasional 2005 – 2025 untuk mencapai tujuan utama dari periode terakhir dari acuan rencana pembangunan nasional yang diterjemahkan dalam Tema RPJMN IV tahun 2020 – 2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong- Royong”. Arah kebijakan dan Strategi tersebut lebih jauh meliputi:

- 1) Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Permukiman
Peningkatkan penyediaan infrastruktur permukiman yang disertai dengan pengembangan sistem pengelolaan dan pemanfaatan yang partisipatif dan berkelanjutan.

Tabel 3.1

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Permukiman

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI
Pengembangan Permukiman		
1	Peningkatkan akses masyarakat secara bertahap terhadap permukiman layak dan aman untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.	a). Penyusunan dan penyiapan landasan penyelenggaraan kawasan permukiman. b). Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk penanganan permukiman. c). Pengelolaan sistem informasi nasional yang terintegrasi dengan system informasi daerah d). Membangun dan mengelola sistem informasi nasional yang terintegrasi dengan sistem informasi daerah dan dimutakhirkan secara berkala e). Penanganan permukiman kumuh perkotaan terkait dengan upaya penurunan kumuh perkotaan menjadi 0% melalui upaya peningkatan kualitas lingkungan dan pelayanan prasarana dan sarana dasar permukiman dengan pendekatan kegiatan fisik maupun nonfisik f). Pengembangan permukiman baru dan perkotaan layakhuni terkait dengan upaya pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) dan perwujudan Kota Berkelanjutan. g). Percepatan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar permukiman perdesaan. h). Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang berkualitas yang mendukung peningkatan produktivitas kawasan perdesaan i). Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan. j). Percepatan penyediaan sarana dan prasarana permukiman perbatasan memenuhi SPM k). Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang memiliki ketahanan terhadap bencana.

2) Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perumahan

Peningkatan akses masyarakat secara bertahap terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau.

Tabel 3.2
Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Perumahan

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI
1	Penyediaan rumah baru layak huni	- a). Integrasi pembangunan hunian vertikal untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan simpul transportasi publik. - b). Penyediaan perumahan melalui inclusive urban renewal dan konsolidasi tanah dalam rangka penanganan permukiman kumuh skala kawasan di wilayah perkotaan. - c). Penyediaan hunian layak bagi ASN/TNI/POLRI. - d). Pengoptimalan potensi penyediaan perumahan berbasis komunitas/kelompok masyarakat dankolaborasi. - e). Pemanfaatan tanah BMN/BUMN/BMD/BUMD untuk mendukung penyediaan rumah sewa untuk kelompok MBR (social rental housing) bagi MBR, termasuk kelompok millennial dan keluarga baru yang berpenghasilan rendah, khususnya di wilayah perkotaan. - f). Penyediaan hunian layak untuk mendukung pembangunan dan pengembangan ibu kota negara. - g). Pengoptimalan penyediaan PSU untuk mendorong pengembangan perumahan skala besar pada lingkungan hunian baru perkotaan. - h). Dukungan penyediaan PSU untuk mendorong pengembangan perumahan skala besar pada lingkungan hunian perkotaan - i). Integrasi penyediaan hunian dengan tata ruang, sistem infrastruktur wilayah, arah pengembangan wilayah/kawasan strategis dan memperhatikan aspek mitigasi-adaptasi terhadap potensi bencana.
2	Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni	- a). Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sehingga memenuhi indikator kekayaan secara minimal melalui pengoptimalan potensi keswadayaan masyarakat, dukungan pemda dan stakeholder lainnya, serta pemanfaatan bahan/material lokal. - b). Dukungan regulasi afirmatif yang mengakomodasi rumah adat/desain tradisional sebagai rumah layak huni. - c). Dukungan regulasi terhadap upaya peningkatan kualitas bagi rumah yang ditempati oleh lebih dari 1 (satu) keluarga secara bersama (co-housing)

NO	KEBIJAKAN	STRATEGI
3	Penyiapan enabling environment untuk mengoptimalkan Penyediaan hunian layak	a). Harmonisasi dan penyediaan regulasi yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman. b). Dukungan regulasi untuk mengakomodasi pemanfaatan rumah selain rumah formal, seperti rumah yang ditempati oleh lebih dari 1 (satu) keluarga secara bersama (co-housing), rumah singgah (social housing, dan rumah adat. c). Penguatan implementasi standar keamanan dan kelayakan bangunan. d). Peningkatan kapasitas pemerintah/pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. e). Peningkatan kolaborasi dan kemitraan pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha. f). Pembentukan dan peningkatan peran badan badan perumahan public dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman di perkotaan/metropolitan, termasuk untuk mengelola rumah sewa untuk

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

SDGs dirancang dengan melibatkan seluruh aktor pembangunan, baik itu Pemerintah, *Civil Society Organization (CSO)*, sektor swasta, akademisi, dan sebagainya. Dengan mengusung tema ***"Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan"***, SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs.

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai agenda pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca-2015, terutama berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 mengenai isu penipisan sumber daya alam, kerusakan lingkungan, perubahan iklim, perlindungan sosial, ketahanan pangan dan energi, dan pembangunan yang

lebih berpihak pada kaum miskin. Tiga Prinsip Pelaksanaan SDG's:

1. ***Universality*** – SDGs dilaksanakan oleh negara maju maupun negara berkembang
2. ***Integration*** – SDGs dilaksanakan secara terintegrasi dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan
3. ***No One Left Behind / Tidak Meninggalkan Satu Orangpun***
 - a). Harus memberi manfaat bagi semua, terutama yang rentan
 - b). Pelaksanaan melibatkan semua pemangku kepentingan
 - c). Keadilan Prosedural yaitu sejauh mana seluruh pihak terutama yang selama ini tertinggal dapat terlibat dalam keseluruhan proses pembangunan
 - d). Keadilan Substansial yaitu sejauh mana kebijakan dan program pembangunan dapat atau mampu menjawab persoalan-persoalan warga terutama kelompok tertinggal.

Tujuan SDGs mencakup skala universal, dengan kerangka kerja yang utuh dalam membantu negara-negara di dunia menuju pembangunan berkelanjutan, melalui tiga pendekatan, yakni pembangunan ekonomi, keterbukaan dalam tatanan sosial, serta keberlangsungan lingkungan hidup. Secara rinci SDGs mempunyai 17 Tujuan dan 169 target. Adapun tujuan dan target SDGs yang berkaitan langsung dengan DISPERKIM adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Tujuan SDG's terkait DISPERKIM

NO	GOAL/TARGET GLOBAL	INDIKATOR GLOBAL	TARGET NASIONAL (RPJMN 2020-2024)	INDIKATOR NASIONAL	TARGET DAERAH (RPJMD 2019-)	INDIKATOR PROVINSI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Goal 1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun						
1	1.4 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk lain, seperti properti, warisan, sumber daya alam, teknologi baru dan jasa keuangan, termasuk keuangan mikro.	1.4.1 Proporsi penduduk/ rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar	1. Meningkatkan apenjangkauan pelayanan dasar mencakup identitas hokum, sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat kurang mampu termasuk penyandang disabilitas dan lansia.	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Meningkatny apemenuhan kebutuhan akses aman air minum, sanitasi, rumah layak huni	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak
Goal 11. Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman Tangguh dan Berkelanjutan						
1	11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar permukiman, serta menata kawasan kumuh	11.1.1 Proporsi populasi penduduk urban yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tak layak	Tercapainya pengentasan kawasan permukiman kumuh perkotaan	Persentase Rumah Tangga Kumuh Perkotaan	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan akses aman air minum, sanitasi, rumah layak huni	Persentase Kawasan Permukiman yang layak Huni dan Berkelanjutan

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), yang dimaksud dengan SPM ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Sedangkan yang dimaksud Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Warga Negara. Jenis Pelayanan Dasar

adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak. Adapun SPM Perumahan Rakyat Daerah Provinsi yang diampu oleh DISPERKIM terdiri atas:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi;
- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.

Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yang diampu ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Sedangkan Penerima Pelayanan Dasar untuk setiap Jenis Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara dengan ketentuan sebagai berikut:

- a). Korban bencana provinsi yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk Jenis Pelayanan Dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi;
- b). Masyarakat yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah provinsi untuk Jenis Pelayanan Dasar fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi;

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Renja Disperkim 2024 pada dasarnya harus sinergis dengan prioritas pembangunan kabupaten Kutai Timur, dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dalam rangka mendukung percepatan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional. Tujuan dan sasaran kita tuangkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.4
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

“Terlampir”

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan merupakan rumusan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pada setiap misi. Strategi dan kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dituangkan sebagaimana Tabel di bawah ini :

Tabel 3.5
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

VISI KABUPATEN KUTAI TIMUR			
<i>"Menata Kutai Timur Sejahtera Untuk Semua"</i>			
MISI KE 3 DARI 5 MISI			
"Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata"			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata	Meningkatnya Konektivitas Antar Wilayah	Pembangunan dan Peningkatan Jalan / Jembatan yang merata	Pembangunan/Peningkatan Jalan Lingkungan dan Jembatan yang merata, memadai, serta layak untuk masyarakat
Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Meningkatnya Infrastruktur Fasilitas Perumahan/ permukiman	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Permukiman	Penyediaan Rumah Layak Huni
Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani		Melakukan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh
Menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian		Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan air minum, air limbah, drainase, dan permukiman	Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU)
Terlaksananya Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil		Melaksanakan Proses Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi	Melakukan Percepatan dalam hal Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Sesuai tugas pokok dan fungsi, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai Rencana Strategis (Renstra) yang berorientasi pada kondisi yang diinginkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Renstra tersebut mencakup Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan serta Target Capaian Kinerja yang ingin di Capai selama kurun waktu Periode RENSTRA.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam tahap perencanaan yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Organisasi Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk memecahkan permasalahan, dan menangani isu-isu strategis yang dihadapi, dengan dirumuskannya tujuan, maka dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilakukan oleh organisasi untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih dengan mempertimbangkan sumber daya manusia, dana, sarana, dan prasarana yang dimiliki, selain itu rumusan tujuan strategis ini untuk memantau dan mengukur sejauh mana pencapaian target capaian kinerja organisasi bisa terealisasi secara simultan dan berkelanjutan.

Adapun Tujuan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah :

1. Semakin meningkatnya pelayanan bidang Administrasi Umum dan Administrasi Kepegawaian.
2. Semakin meningkatnya tata kelola urusan Pemerintahan Daerah.
3. Meningkatnya Infrastruktur dasar yang berkualitas secara merata.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan, Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk mencapai tujuan sebagaimana uraian diatas, maka Sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut:

1. Optimalnya Pelayanan dalam Administrasi Umum.
2. Optimalnya Pelayanan dalam Administrasi Kepegawaian.
3. Peningkatan Infrastruktur dasar yang berkualitas secara merata dan optimal.

3.3. Strategi dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Strategi dan Kebijakan dalam Renstra adalah suatu cara dan rumusan Organisasi Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang selaras dengan rencana program prioritas sebuah Organisasi. Strategi menunjukkan bagaimana cara suatu Organisasi mencapai tujuan, sasaran, dan target kinerja hasil (outcome) dari program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Organisasi tersebut.

Strategi dan Kebijakan tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas yang menjadi tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah tersebut. Strategi merupakan rumusan perencanaan komperhensif tentang bagaimana organisasi mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja organisasi.

Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Strategi dan Kebijakan dilengkapi dengan informasi yang relevan melalui proses analisis yang seksama untuk kegiatan penilaian situasi kondisi sesuatu organisasi, dapat tercakup dalam analisis yang terdiri atas dua kegiatan utama yaitu : analisis internal dan analisis eksternal terhadap keberadaan suatu organisasi. Adapun Strategi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat diuraikan dibawah ini :

1. Terasilitasinya penyusunan Dokumen Perencanaan, pengadministrasian, serta pelaporan bidang pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur.
2. Terasilitasinya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah , Pengadaan Barang Milik Daerah, dan Penyediaan Jasa Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur.

3. Terfasilitasinya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.
4. Terfasilitasinya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.
5. Terfasilitasinya Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan.

Dan Kebijakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat diuraikan dibawah ini :

1. Terfasilitasinya penyusunan Dokumen Perencanaan (RENSTRA, RENJA dan RKA/DPA) di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur.
2. Terfasilitasinya penatausahaan keuangan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur.
3. Terfasilitasinya penyusunan bahan laporan keuangan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur.
4. Terlaksananya Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.
5. Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha.
6. Terlaksananya Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan.

3.4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rencana Kerja merupakan penjabaran perencanaan tahunan dengan mengacu kepada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan Kinerja dan laporan keuangan pada setiap akhir tahun anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Dalam rencana kerja ini disusun berdasarkan bagian atau bidang yang ada di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur. Untuk mengimplementasikan seluruh kebijakan yang telah ditetapkan dan dirumuskan dalam

Program Kerja Tahun 2024, maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur direncanakan akan melaksanakan 6 Program 14 (Empat Belas) Kegiatan dan 2 UPT seperti pada tabel yang terlampir.

Tabel 3.6
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024

“Terlampir”

BAB IV**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH****4.1. Rumusan Perencanaan Anggaran**

Rumusan Perencanaan Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk Tahun 2024 adalah sebesar Rp. 1.065.632.924.145,00 (Satu Triliun Enam Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah), sebagaimana diuraikan dalam TABEL 4.1 dibawah ini :

TABEL 4.1
RUMUSAN AWAL PENDANAAN TAHUN ANGGARAN 2024
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR

NO	PROGRAM	RENCANA PENDANAAN 2024
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	29.300.000.000
2	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	349.300.000.000
3	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	0
4	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	658.219.000.000
5	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	24.056.924.145
7	UPT PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN SANGATTA UTARA	3.237.000.000
8	UPT PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN SANGATTA SELATAN	1.420.000.000
JUMLAH TOTAL		1.065.632.924.145

4.2. Rencana Kerja Perangkat Daerah

Suatu program dan kegiatan tentunya memerlukan sumber pendanaan yg berkesinambungan dan terukur, agar setiap program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dan mencapai target yang diharapkan, namun pendanaan tersebut tentulah harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah suatu perangkat daerah, agar program prioritas pembangunan daerah dapat dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan perencanaan, maka diharapkan selektif dan kehati-hatian mutlak diperlukan dalam mendanai sebuah program dan kegiatan dimaksud.

Untuk lebih jelasnya perihal Rumusan Pendanaan dalam Rancangan Akhir Renja Tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana uraian dalam TABEL 4.2 di bawah ini :

Tabel 4.2
Rumusan Pendanaan dalam Rancangan Akhir Renja Tahun 2024

“Terlampir”

BAB V

PENUTUP

5.1. CATATAN PENTING

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun 2021 – 2026. Renja Tahun 2024 memuat program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja kegiatan dan sub kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan, untuk tahun 2024. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mendapatkan pagu indikatif sebesar Rp. 1.065.632.924.145,00 (Satu Triliun Enam Puluh Lima Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah), yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara) Tahun Anggaran 2024.

5.2. KAIDAH PELAKSANAAN

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atas proses selanjutnya.

5.3. SARAN DAN TINDAK LANJUT

Untuk mencapai target sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur yang telah ditetapkan pada tahun 2024 maka perlu didukung dengan program dan kegiatan. Agar kegiatan - kegiatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka perlu dilakukan koordinasi lintas Unit Kerja/Perangkat Daerah dalam rangka sinergitas. Demikian Rencana Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kutai Timur ini di buat, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja berikutnya.



LAMPIRAN

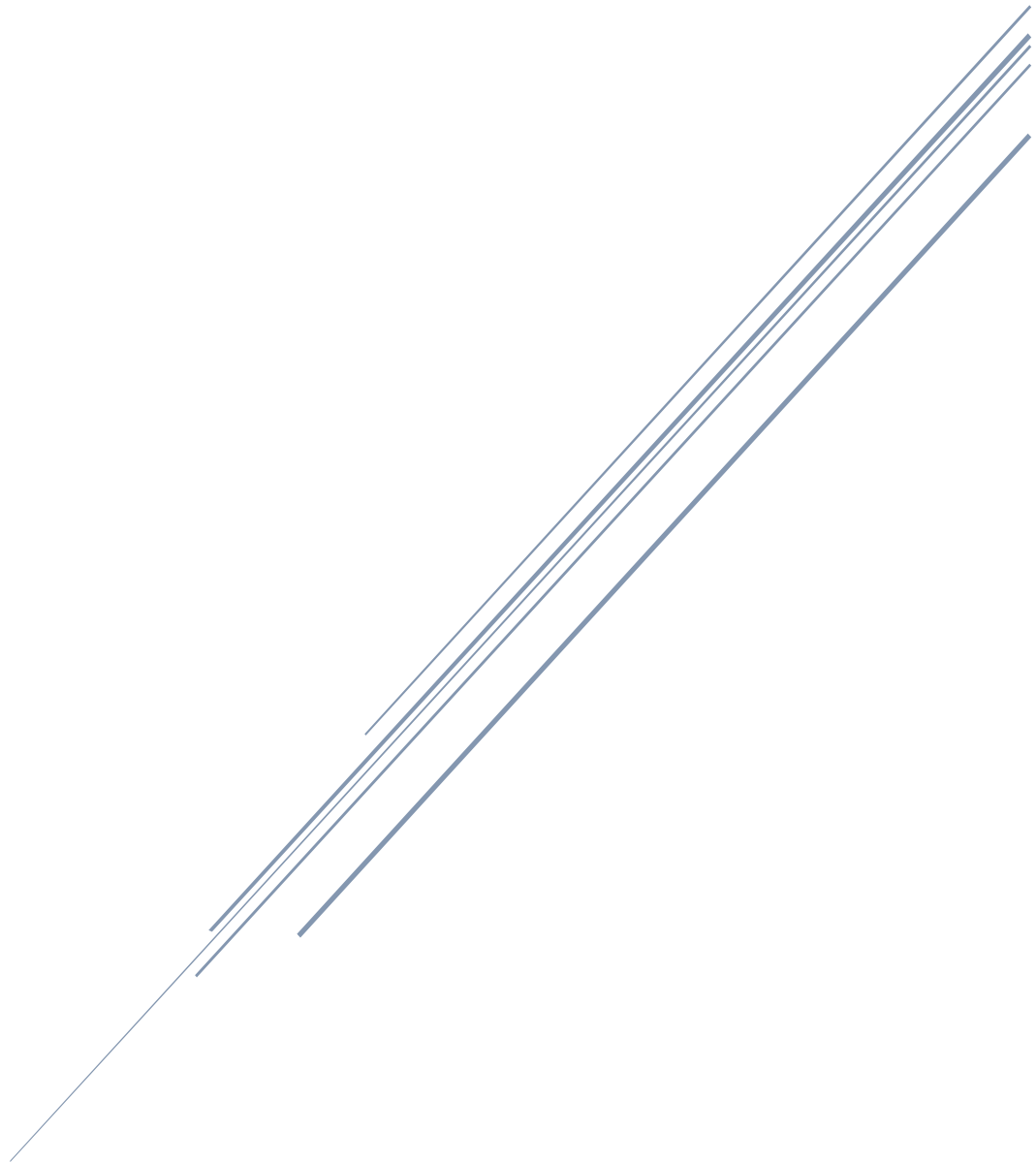
RENJA TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN



TABEL 2.1

Tabel Realisasi Anggaran



**Renja
Tahun 2024**

Realisasi Anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2023

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Sifat	Target Kinerja Dan Pagu 2022 Apbd			Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023				Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2023		Predikat	
										S.D November		Desember					
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)			
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP		
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					0		1.176.290.377.270		53.872.337.136		1.104.095.377.919		93		ST	
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					0		1.173.590.377.270		52.510.257.939		1.101.683.106.652		61		R	
1.04.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN KEUANGAN	positif	100	Persen	0	100	Persen	21.899.630.078	10.191.996.875	100	18.884.887.244	100	86	ST	T	
1.04.001.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	positif	0	Persen	0	100	Persen	840.000.000	437.445.186	100	723.813.173	100	86	ST	T	
1.04.001.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	positif	0	Dokumen	0	2	Dokumen	200.000.000	73.630.468	2	159.239.601	100	79	ST	T	
1.04.001.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	positif	0	Dokumen	0	1	Dokumen	100.000.000	51.182.469	1	92.768.993	100	92	ST	ST	
1.04.001.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	positif	0	Dokumen	0	2	Dokumen	70.000.000	67.099.572	2	69.998.192	100	99	ST	ST	
1.04.001.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	positif	0	Dokumen	0	1	Dokumen	70.000.000	55.061.711	1	67.259.811	100	96	ST	ST	
1.04.001.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	positif	0	Dokumen	0	2	Dokumen	95.000.000	74.895.569	2	94.653.341	100	99	ST	ST	
1.04.001.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	positif	0	Laporan	0	1	Laporan	160.000.000	78.540.645	1	103.868.003	100	64	ST	R	
1.04.001.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	positif	0	Laporan	0	1	Laporan	145.000.000	37.034.752	1	136.025.232	100	93	ST	ST	
1.04.001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Non ASN, Pelaksanaan Penatausahaan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan	positif	100	Persen	0	100	Persen	15.189.630.078	8.510.239.556	100	12.669.867.152	163,93	83	ST	T	
1.04.001.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	positif	0	Orang/bulan	0	61	Orang/bulan	9.519.049.322	6.356.854.108	61	8.429.013.077	100	97	ST	ST	
1.04.001.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	positif	0	Dokumen	0	1	Dokumen	4.186.380.756	1.478.776.354	1	3.004.343.516	100	71	ST	S	
1.04.001.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	positif	0	Dokumen	0	1	Dokumen	774.200.000	530.670.504	1	774.190.750	100	99	ST	ST	
1.04.001.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	positif	0	Laporan	0	1	Laporan	160.000.000	39.037.492	1	124.567.876	100	77	ST	T	
1.04.001.2.02.006	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	positif	0	Dokumen	0	1	Dokumen	160.000.000	10.757.090	1	103.197.776	100	64	ST	R	
1.04.001.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	positif	0	Laporan	0	4	Laporan	160.000.000	25.534.739	4	121.850.350	100	76	ST	T	
1.04.001.2.02.008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	positif	0	Dokumen	0	1	Dokumen	230.000.000	68.609.269	1	112.703.807	100	49	ST	SR	
1.04.001.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	positif	100	Persen	0	100	Persen	176.500.000	100.933.500	100	176.382.000	100	99	ST	ST	
1.04.001.2.03.001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	positif	0	Dokumen	0	1	Dokumen	25.000.000	380.000	1	24.987.500	100	99	ST	ST	
1.04.001.2.03.005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	positif	0	Laporan	0	1	Laporan	47.500.000	30.000.000	1	47.481.000	100	99	ST	ST	
1.04.001.2.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	positif	0	Laporan	0	1	Laporan	104.000.000	70.553.500	1	103.913.500	100	99	ST	ST	
1.04.001.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	positif	100	Persen	0	100	Persen	983.672.860	489.105.000	100	946.330.500	100	96	ST	ST	
1.04.001.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	positif	0	Paket	0	2	Paket	498.444.860	103.565.000	2	493.011.500	100	98	ST	ST	

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Sifat	Target Kinerja Dan Pagu 2022 Apbd			Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023				Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2023		Predikat	
										S.D November		Desember					
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)			
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
1.04.001.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	positif	0	Orang	0	10	Orang	485.228.000		385.540.000	10	453.319.000	100	93	ST	ST
1.04.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	positif	100	Persen	0	100	Persen	652.755.982		243.359.526	100	598.743.166	100	91	ST	ST
1.04.001.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	positif	0	Paket	0	0	Paket	-		-	0	-	0	0	SR	SR
1.04.001.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	positif	0	Paket	0	1	Paket	76.564.271		45.646.416	1	65.219.416	100	85	ST	T
1.04.001.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	positif	0	Paket	0	1	Paket	118.043.128		16.960.500	1	113.975.500	100	96	ST	ST
1.04.001.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	positif	0	Paket	0	1	Paket	59.000.000		35.216.370	1	52.622.654	100	89	ST	T
1.04.001.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	positif	0	Paket	0	1	Paket	50.000.000		33.396.331	1	47.458.331	100	94	ST	ST
1.04.001.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	positif	0	Laporan	0	1	Laporan	225.451.000		88.808.307	1	202.710.363	100	89	ST	T
1.04.001.2.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	positif	0	Dokumen	0	1	Dokumen	123.697.583		23.331.602	1	116.756.902	100	94	ST	ST
1.04.001.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	positif	100	Persen	0	100	Persen	2.300.000.000		-	100	2.103.606.000	100	91	ST	ST
1.04.001.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	positif	0	Unit	0	1	Unit	-		-	0	-	0	0	SR	SR
1.04.001.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	positif	0	Unit	0	5	Unit	2.300.000.000		-	5	2.103.606.000	100	91	ST	ST
1.04.001.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	positif	0	Unit	0	0	Unit	-		-	0	-	0		SR	
1.04.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	positif	100	Persen	0	100	Persen	1.599.625.000		334.738.920	100	1.515.897.678	100	94	ST	ST
1.04.001.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	positif	0	Laporan	0	1	Laporan	382.625.000		192.137.620	1	327.367.798	100	85	ST	T
1.04.001.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	positif	0	Laporan	0	1	Laporan	1.217.000.000		142.601.300	1	1.188.529.880	100	97	ST	ST
1.04.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	positif	100	Persen	0	100	Persen	157.446.158		76.175.187	100	150.247.575	100	95	ST	ST
1.04.001.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	positif	0	Unit	0	3	Unit	107.446.158		42.195.187	3	100.347.575	100	93	ST	ST
1.04.001.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	positif	0	Unit	0	33	Unit	50.000.000		33.980.000	33	49.900.000	100	99	ST	ST
1.04.001.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	positif	0	Unit	0	0	Unit	-		-	0	-	0		SR	
1.04.002	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	positif	0	%	0	0,98	%	3.500.000.000		369.517.848	0	1.225.481.776	0	35	SR	SR
1.04.002.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	positif	0	Kali	0	1	Kali	100.000.000		38.922.150	1	67.636.270	100	67	ST	S
1.04.002.2.02.001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	positif	0	Orang	0	5	Orang	100.000.000		38.922.150	5	67.636.270	100	67	ST	S
1.04.002.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	positif	0	Persen	0	100	Persen	3.400.000.000		330.595.698	34,05	1.157.845.506	34,05	34	SR	SR
1.04.002.2.03.001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	positif	0	Unit Rumah	0	20	Unit Rumah	2.400.000.000		86.700.948	0	197.704.666	0	8	SR	SR

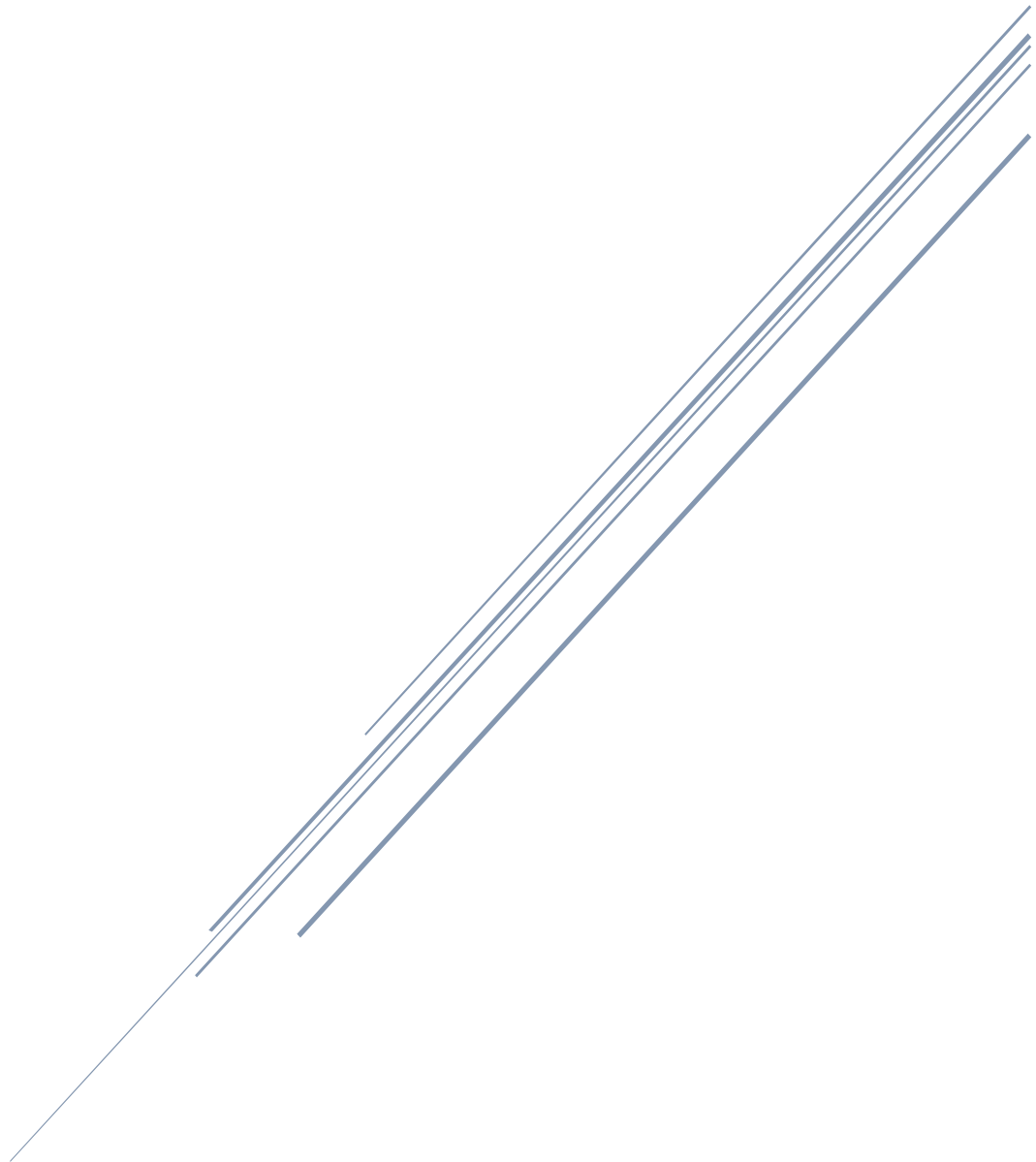
Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Sifat	Target Kinerja Dan Pagu 2022 Apbd			Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023				Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2023		Predikat	
										S.D November		Desember					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)			(6)			(7)		(8)		(9)		K	RP
				K	RP		K	RP		K	RP	K	RP	K	RP		
1.04.002.2.03.002	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	positif	0	Dokumen	0	1	Dokumen	1.000.000.000		243.894.750	1	960.140.840	100	96	ST	ST
1.04.002.2.03.003	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	positif	0	Ha	0	1	Ha	-		-	0	-	0	0	SR	SR
1.04.003	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	positif	0	%	0	22	%	473.601.028.204		12.174.244.200	23	440.971.582.933	104,55	93	ST	ST
1.04.003.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	positif	0	Persen	0	100	Persen	-		-	0	-	0	0	SR	
1.04.003.2.02.001	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	positif	0	Dokumen	0	0	Dokumen	-		-	0	-		0		SR
1.04.003.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	positif	0	Persen	0	100	Persen	473.601.028.204		12.174.244.200		440.971.582.933		93		ST
1.04.003.2.03.001	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	positif	0	Dokumen	0	45	Dokumen	2.910.200.000		41.224.400	45	2.832.789.600	100	97	ST	ST
1.04.003.2.03.002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	positif	0	Unit Rumah	0	28	Unit Rumah	1.600.000.000		-	0	-	0	0	SR	SR
1.04.003.2.03.003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	positif	0	Dokumen	0	6	Dokumen	465.690.828.204		12.083.546.800	6	434.825.452.333	100	93	ST	ST
1.04.003.2.03.006	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	positif	0	Ha	0	2	Ha	3.400.000.000		49.473.000	2	3.313.341.000	100	97	ST	ST
1.04.004	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Presentase Jumlah Unit RTLH	positif	0	%	0	0,249	%	17.902.358.988		185.485.400	0,245	16.807.824.634	98,353	93	ST	ST
1.04.004.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	positif	0	Unit	0	20	Unit	17.902.358.988		185.485.400	20	16.807.824.634	100	93	ST	ST
1.04.004.2.01.001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	positif	0	Unit Rumah	0	20	Unit Rumah	1.500.000.000		67.514.800	20	1.435.852.557	50	95	SR	ST
1.04.004.2.01.002	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	positif	0	Dokumen	0	1	Dokumen	16.402.358.988		117.970.600	1	15.371.972.077	100	93	ST	ST
1.04.005	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	positif	0	%	0	21	%	656.587.360.000		29.552.515.950	23	623.731.809.552	109,52	94	ST	ST
1.04.005.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	positif	0	Lokasi	0	18	Lokasi	656.587.360.000		29.552.515.950		623.731.809.552		94		ST
1.04.005.2.01.001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	positif	0	Dokumen	0	42	Dokumen	10.800.000.000		2.359.460.293	42	10.500.993.597	100	97	ST	ST
1.04.005.2.01.002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	positif	0	Lokasi	0	18	Lokasi	645.637.360.000		27.172.250.657	18	613.200.005.255	1800	94	ST	ST
1.04.005.2.01.004	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	positif	0	Laporan	0	0	Laporan	150.000.000		20.805.000	0	30.810.700		20		SR
1.04.006	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	TERLAKSANANYA PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	positif	0	Persen	0	69,14	Persen	100.000.000		36.497.666	70,59	61.520.513	102,1	61	ST	R

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Sifat	Target Kinerja Dan Pagu 2022 Apbd			Target Kinerja Dan Pagu 2023 Apbd			Realisasi 2023				Tingkat Capaian Kinerja Dan Anggaran (%) 2023		Predikat	
										S.D November		Desember					
				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8)			
				K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
1.04.006.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	positif	0	Laporan	0	1	Laporan	100.000.000		36.497.666	1	61.520.513	100	61	ST	R
1.04.006.2.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	positif	0	Laporan	0	1	Laporan	100.000.000		36.497.666	1	61.520.513		61		R
1.04.0.00.0.00.01.0001	UPT Pertamanan dan Pemakaman Sangatta Utara					0			2.000.000.000		975.005.092		1.808.784.892		30		SR
1.04.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN KEUANGAN	positif	100	Persen	0	100	Persen	280.000.000		192.777.592	100	251.731.492	100	89	ST	T
1.04.001.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	positif	100	Persen	0	100	Persen	40.000.000		38.971.900	100	38.971.900	100	97	ST	ST
1.04.001.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	positif	0	Paket	0	1	Paket	40.000.000		38.971.900	1	38.971.900	100	97	ST	ST
1.04.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	positif	100	Persen	0	100	Persen	115.000.000		84.885.650	100	113.815.750	100	98	ST	ST
1.04.001.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	positif	0	Paket	0	1	Paket	100.000.000		71.881.150	1	98.987.250	100	98	ST	ST
1.04.001.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	positif	0	Paket	0	1	Paket	15.000.000		13.004.500	1	14.828.500	100	98	ST	ST
1.04.001.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	positif	100	Persen	0	100	Persen	-		-	0	-	0	0	SR	
1.04.001.2.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	positif	0	Unit	0	1	Unit	-		-	0	-	0	0	SR	SR
1.04.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	positif	100	Persen	0	100	Persen	80.000.000		47.569.042	100	77.592.842	100	96	ST	ST
1.04.001.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	positif	0	Laporan	0	1	Laporan	80.000.000		47.569.042	1	77.592.842		96		ST
1.04.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	positif	100	Persen	0	100	Persen	45.000.000		21.351.000	100	21.351.000	100	47	ST	SR
1.04.001.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	positif	0	Unit	0	3	Unit	40.000.000		16.968.000	3	16.968.000	100	42	ST	SR
1.04.001.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	positif	0	Unit	0	3	Unit	5.000.000		4.383.000	3	4.383.000	100	87	ST	T
1.04.005	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	TERLAKSANANYA PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	positif	0	Lokasi	0	3	Lokasi	1.720.000.000		782.227.500	3	1.557.053.400	100	90	ST	T
1.04.005.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terlaksananya Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	positif	1	Lokasi	0	3	Lokasi	1.720.000.000		782.227.500	3	1.557.053.400	100	90	ST	T
1.04.005.2.01.002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	positif	0	Lokasi	0	3	Lokasi	1.720.000.000		782.227.500	3	1.557.053.400	100	90	ST	T
1.04.0.00.0.00.01.0002	UPT Pertamanan dan Pemakaman Sangatta Selatan					0			700.000.000		387.074.105		603.486.375		25		SR
1.04.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	CAKUPAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN DAN KEUANGAN	positif	100	Persen	0	100	Persen	340.000.000		221.465.005	100	362.960.055	100	106	ST	ST
1.04.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	positif	100	Persen	0	100	Persen	120.000.000		35.515.155	100	69.742.455	100	58	ST	R
1.04.001.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	positif	0	Paket	0	1	Paket	100.000.000		19.874.750	1	52.106.150	100	52	ST	R
1.04.001.2.06.005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	positif	0	Paket	0	1	Paket	20.000.000		15.640.405	1	17.636.305	100	88	ST	T
1.04.001.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	positif	100	Persen	0	100	Persen	-		-	0	-	0	0	SR	
1.04.001.2.07.009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	positif	0	Unit	0	1	Unit	-		-	0	-	0	0	SR	SR
1.04.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	positif	100	Persen	0	100	Persen	200.000.000		175.174.800	100	273.504.800	100	136	ST	ST

[illegible]

TABEL 2.5

Rancangan Awal RKPD 2024



**Renja
Tahun 2024**

RANCANGAN AWAL RKPD
Tahun Anggaran 2024
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.065.632.924.145
1.04.1.03.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.060.975.924.145
1.04.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.056.924.145
1.04.001.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.300.000.000
1.04.001.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	250.000.000
1.04.001.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100.000.000
1.04.001.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100.000.000
1.04.001.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	100.000.000
1.04.001.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	100.000.000
1.04.001.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	150.000.000

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.04.001.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	500.000.000
1.04.001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.856.924.145
1.04.001.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13.428.349.037
1.04.001.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.258.575.108
1.04.001.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	750.000.000
1.04.001.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100.000.000
1.04.001.2.02.006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	120.000.000
1.04.001.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100.000.000
1.04.001.2.02.008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100.000.000
1.04.001.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	250.000.000

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.04.001.2.03.001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100.000.000
1.04.001.2.03.005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	75.000.000
1.04.001.2.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	75.000.000
1.04.001.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	300.000.000
1.04.001.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	200.000.000
1.04.001.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100.000.000
1.04.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	950.000.000
1.04.001.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100.000.000
1.04.001.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000
1.04.001.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100.000.000
1.04.001.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	100.000.000
1.04.001.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000
1.04.001.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	400.000.000
1.04.001.2.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	100.000.000

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.04.001.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.500.000.000
1.04.001.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.500.000.000
1.04.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	700.000.000
1.04.001.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	400.000.000
1.04.001.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	300.000.000
1.04.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200.000.000
1.04.001.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	100.000.000
1.04.001.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.000.000
1.04.002	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	29.300.000.000
1.04.002.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.100.000.000
1.04.002.2.01.02	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	300.000.000
1.04.002.2.01.03	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	100.000.000
1.04.002.2.01.04	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	100.000.000

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.04.002.2.01.06	Pendataan Rumah sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	100.000.000
1.04.002.2.01.09	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	500.000.000
1.04.002.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota	200.000.000
1.04.002.2.02.01	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Kepada Masyarakat /Sukarelawan Tanggap Bencana	100.000.000
1.04.002.2.02.02	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan	100.000.000
1.04.002.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota	28.000.000.000
1.04.002.2.03.01	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	6.000.000.000
1.04.002.2.03.04	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	14.000.000.000
1.04.002.2.03.06	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.000.000.000
1.04.002.2.03.09	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	7.000.000.000
1.04.003	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	349.300.000.000
1.04.003.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.000.000.000

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.04.003.2.02.008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan PKP	1.000.000.000
1.04.003.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	348.300.000.000
1.04.003.2.03.002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	30.000.000.000
1.04.003.2.03.003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	306.300.000.000
1.04.003.2.03.004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran / Peremajaan Permukiman Kumuh	500.000.000
1.04.003.2.03.007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	1.000.000.000
1.04.003.2.03.011	Pelaksanaan Permukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	500.000.000
1.04.003.2.03.013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	10.000.000.000
1.04.004	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	-
1.04.004.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	-
1.04.004.2.01.001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	

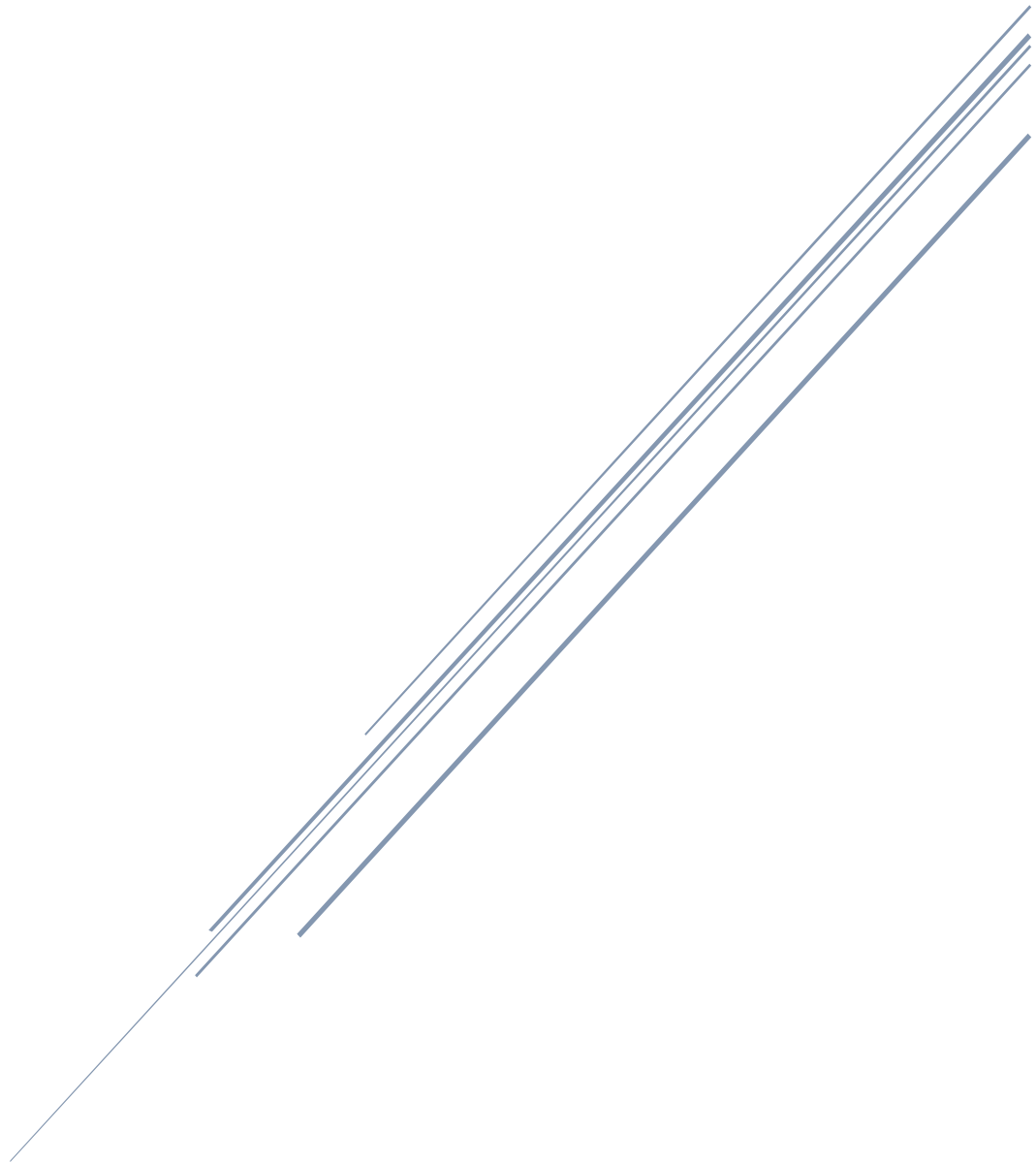
Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.04.004.2.01.002	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
1.04.004.2.01.003	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	
1.04.005	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	658.219.000.000
1.04.005.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	658.219.000.000
1.04.005.2.01.001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	11.000.000.000
1.04.005.2.01.002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	647.219.000.000
1.04.006	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	100.000.000
1.04.006.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	100.000.000

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.04.006.2.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	100.000.000
1.04.0.00.0.00.01.0001	UPT Pertamanan dan Pemakaman Sangatta Utara	3.237.000.000
1.04.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.237.000.000
1.04.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	950.000.000
1.04.001.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000
1.04.001.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	800.000.000
1.04.001.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000
1.04.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.267.000.000
1.04.001.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.267.000.000
1.04.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000
1.04.001.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000
1.04.005	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.000.000.000
1.04.005.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.000.000.000

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Pagu Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.04.005.2.01.002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	1.000.000.000
1.04.0.00.0.00.01.0002	UPT Pertamanan dan Pemakaman Sangatta Selatan	1.420.000.000
1.04.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.120.000.000
1.04.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	450.000.000
1.04.001.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100.000.000
1.04.001.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	300.000.000
1.04.001.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.000.000
1.04.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	650.000.000
1.04.001.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	650.000.000
1.04.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	20.000.000
1.04.001.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000
1.04.005	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	300.000.000
1.04.005.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	300.000.000
1.04.005.2.01.002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	300.000.000

TABEL 3.4

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

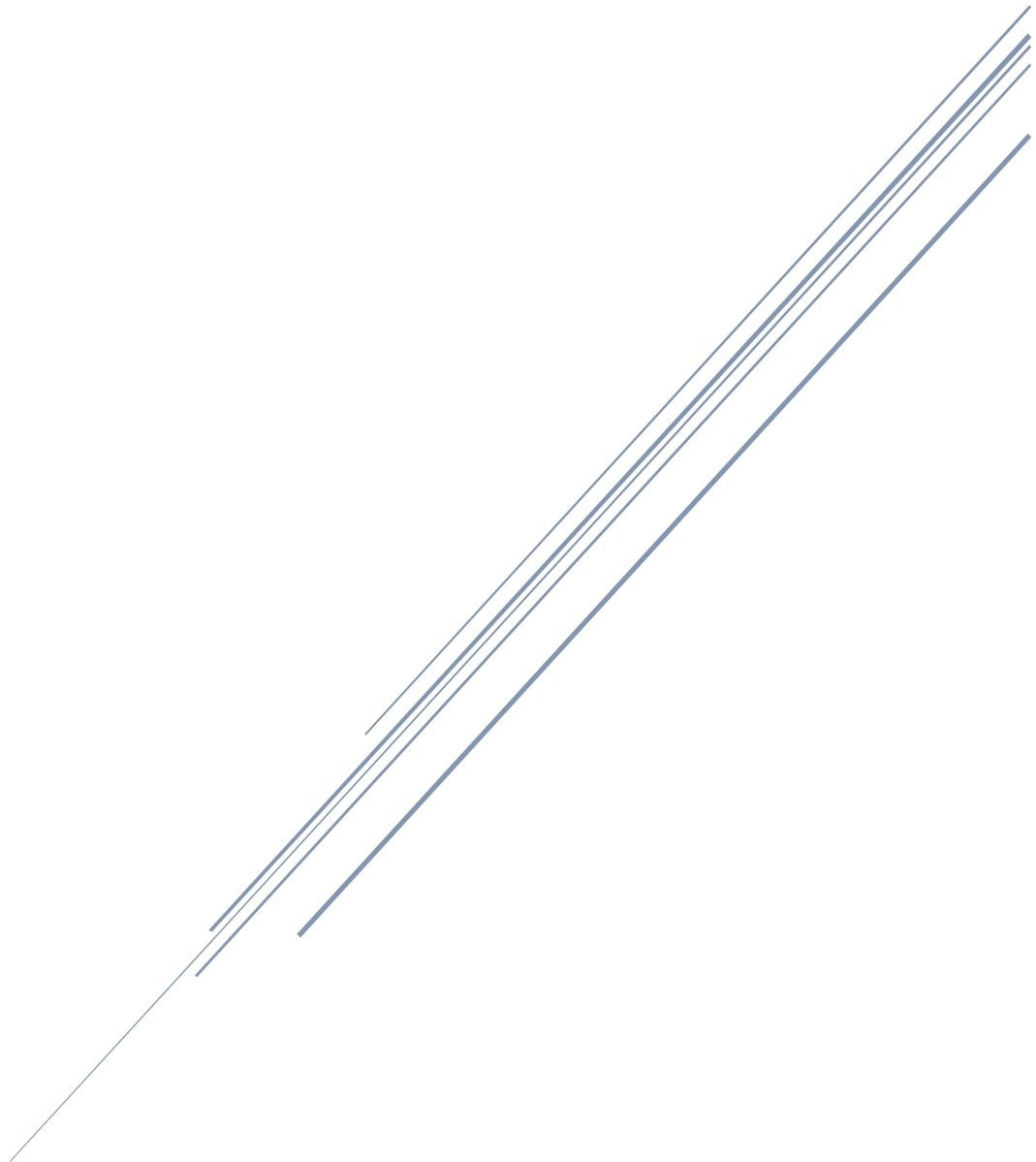


Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

KODE PROGRAM	MISI/ TUJUAN/ SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/ INDIKATOR SASARAN	RUMUS	SATUAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD		TARGET CAPAIAN DAN PENDANAAN PROGRAM				
							2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
									TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET
Misi 3 : Mewujudkan Pelayanan Dasar Masyarakat Secara Proporsional dan Merata													
01.00	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN												
	Tujuan: Menata semua layanan kebutuhan infrastruktur dasar dan Ekonomi Bagi Masyarakat Secara Proporsional dan Merata (M3.T1)	IPD (Indek Pembangunan Desa)											
	Sasaran 1: Meningkatkan Konektivitas Antar Wilayah) (M3.T1.S1)				Peningkatan Sarana Prasarana Transportasi (M3.T1.S1.ST1)								
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU ----- x 100-% Jumlah unit rumah kab/kota	%		Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Jembatan (M3.T1.S1.ST1.AK1)	13,705%	15,076%	18,091%	21,709%	26,051%	31%	37,514%
	Sasaran 2: Meningkatkan Infrastruktur Fasilitas Perumahan/ permukiman) (M3.T1.S2)				Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Permukiman (M3.T1.S2.ST1)								
1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n ----- x 100 % Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n	%	Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Permukiman (M3.T1.S2.ST1)	Penyediaan Rumah Layak Huni (M3.T1.S2.ST1.AK3) (2.5)	0,0000%	0,0000%	0%	0,9847	1,231	1,4771	1,723
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) ----- x 100 % Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha	%		Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh (M3.T1.S2.ST1.AK4) (2.2 & 2.5)	30,67% (3 Lokasi SK 2016)	30,67 % (3 Lokasi SK 2016)	30,67% (6 Lokasi BA FGD Review SK Kumuh 2021)	22,69 % (6 Lokasi BA FGD Review SK Kumuh 2021)	24,91% (6 Lokasi BA FGD Review SK Kumuh 2021)	42,35 % (6 Lokasi BA FGD Review SK Kumuh 2021)	47,33 % (6 Lokasi BA FGD Review SK Kumuh 2021)
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Berkurangnya jumlah unit RTLH	Jumlah unit rumah tidak layak huni ----- x 100 % Jumlah total unit rumah kabupaten/kota	%		Penyediaan Rumah Layak Huni (M3.T1.S2.ST1.AK3) (2.5)	0,2472	0,2479	0,2486	0,2490	0,2493	0,24942	0,24943
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU ----- x 100-% Jumlah unit rumah kab/kota	%		Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) (M3.T1.S2.ST1.AK2) (1.4, 2.2, & 2.3)	13,705%	15,076%	18,091%	21,709%	26,051%	31%	37,514%
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN, SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Cakupan Penerbitan Ijin Pengembangan	Jumlah Ijin Pengembangan Jumlah Perumahan Kabupaten x 100 %	%		Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) (M3.T1.S2.ST1.AK2) (1.4, 2.2, & 2.3)	57,14%	62,857%	62,857%	69,143%	76,057%	83,663%	92,029%

TABEL 3.6

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024



Tabel Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Tahun 2024
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Sifat
(1)	(2)	(3)	(4)
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
1.04.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		
1.04.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	positif
1.04.001.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	positif
1.04.001.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	positif
1.04.001.2.01.002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	positif
1.04.001.2.01.003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	positif
1.04.001.2.01.004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	positif
1.04.001.2.01.005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	positif
1.04.001.2.01.006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	positif
1.04.001.2.01.007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	positif
1.04.001.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Non ASN, Pelaksanaan Penatausahaan, Koordinasi dan Penyusunan Laporan	positif

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Sifat
(1)	(2)	(3)	(4)
1.04.001.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	positif
1.04.001.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	positif
1.04.001.2.02.003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	positif
1.04.001.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	positif
1.04.001.2.02.006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	positif
1.04.001.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	positif
1.04.001.2.02.008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	positif
1.04.001.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	positif
1.04.001.2.03.001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	positif
1.04.001.2.03.005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	positif
1.04.001.2.03.006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	positif
1.04.001.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	positif

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Sifat
(1)	(2)	(3)	(4)
1.04.001.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	positif
1.04.001.2.05.009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	positif
1.04.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	positif
1.04.001.2.06.001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	positif
1.04.001.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	positif
1.04.001.2.06.003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	positif
1.04.001.2.06.004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	positif
1.04.001.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	positif
1.04.001.2.06.009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	positif
1.04.001.2.06.010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	positif
1.04.001.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	positif
1.04.001.2.07.006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	positif

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Sifat
(1)	(2)	(3)	(4)
1.04.001.2.07.010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	positif
1.04.001.2.07.011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	positif
1.04.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	positif
1.04.001.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	positif
1.04.001.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	positif
1.04.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	positif
1.04.001.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	positif
1.04.001.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	positif
1.04.001.2.09.010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	positif
1.04.002	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana	positif
1.04.002.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	positif
1.04.002.2.02.001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	positif

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Sifat
(1)	(2)	(3)	(4)
1.04.002.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	positif
1.04.002.2.03.001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	positif
1.04.002.2.03.002	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota atau yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	positif
1.04.002.2.03.003	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Luas lahan yang Tersedia untuk pembangunan rumah bagi korban Bencana Kabupaten/Kota	positif
1.04.003	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	positif
1.04.003.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	positif
1.04.003.2.02.001	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	positif
1.04.003.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	positif
1.04.003.2.03.001	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	positif
1.04.003.2.03.002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	positif
1.04.003.2.03.003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	positif
1.04.003.2.03.006	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Diremajakan/Dipugar	positif

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Sifat
(1)	(2)	(3)	(4)
1.04.004	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Presentase Jumlah Unit RTLH	positif
1.04.004.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	positif
1.04.004.2.01.001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	positif
1.04.004.2.01.002	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	positif
1.04.005	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	positif
1.04.005.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	positif
1.04.005.2.01.001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	positif
1.04.005.2.01.002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	positif
1.04.005.2.01.004	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	positif
1.04.006	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	TERLAKSANANYA PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	positif
1.04.006.2.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	positif
1.04.006.2.01.001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	positif

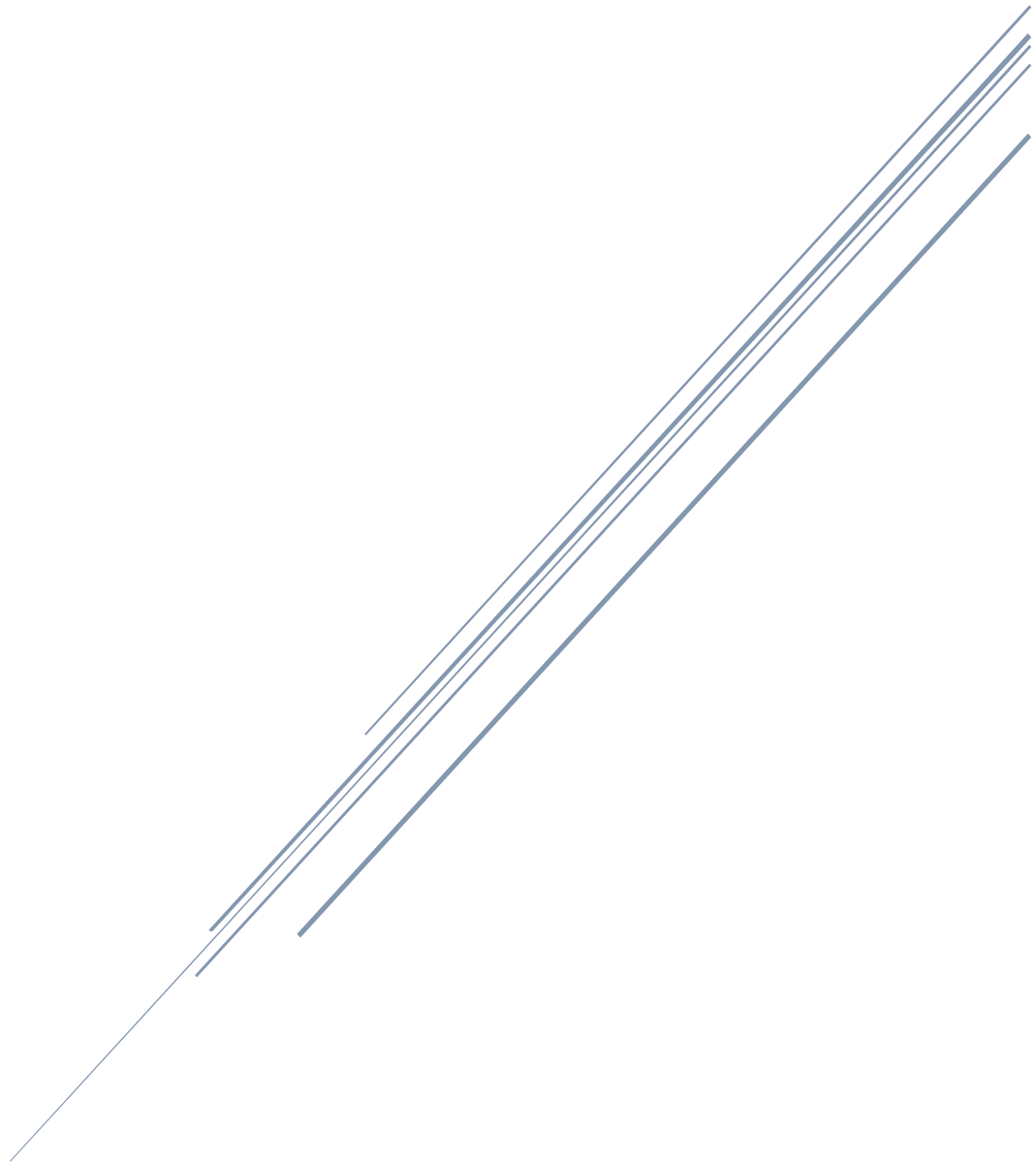
Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Sifat
(1)	(2)	(3)	(4)
1.04.0.00.0.00.01.0003	UPT Pertamanan dan Pemakaman Sangatta Utara		
1.04.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	positif
1.04.001.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	positif
1.04.001.2.05.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	positif
1.04.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	positif
1.04.001.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	positif
1.04.001.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	positif
1.04.001.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	positif
1.04.001.2.07.002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	positif
1.04.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	positif
1.04.001.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	positif
1.04.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	positif

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Sifat
(1)	(2)	(3)	(4)
1.04.001.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	positif
1.04.001.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	positif
1.04.005	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	TERLAKSANANYA PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	positif
1.04.005.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Terlaksananya Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	positif
1.04.005.2.01.002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	positif
1.04.0.00.0.00.01.0004	UPT Pertamanan dan Pemakaman Sangatta Selatan		
1.04.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	TERLAKSANANYA PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	positif
1.04.001.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	positif
1.04.001.2.06.002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	positif
1.04.001.2.06.005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	positif
1.04.001.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	positif
1.04.001.2.07.009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	positif

Kode	Perangkat Daerah / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Sifat
(1)	(2)	(3)	(4)
1.04.001.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	positif
1.04.001.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	positif
1.04.001.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	positif
1.04.001.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	positif
1.04.005	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	TERLAKSANANYA PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	positif
1.04.005.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	positif
1.04.005.2.01.002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Menunjang Fungsi Hunian	positif

TABEL 4.2

Rumusan Pendanaan dalam Rancangan Akhir Renja Tahun 2024



[illegible]

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 5.844.209.100	Rp. 155.790.900			Rp. 6.000.000.000	Rp. 12.000.000.000
1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 13.958.302.500	Rp. 41.697.500			Rp. 14.000.000.000	Rp. 54.000.000.000
1	04	02	2.03	0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 219.260.000	Rp. 780.740.000			Rp. 1.000.000.000	Rp. 1.000.000.000
1	04	02	2.03	0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 6.937.767.500	Rp. 62.232.500			Rp. 7.000.000.000	
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN									
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha									
1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 200.000.000	Rp. 800.000.000			Rp. 1.000.000.000	Rp. 200.000.000
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha									
1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 30.000.000.000				Rp. 30.000.000.000	Rp. 84.000.000.000
1	04	03	2.03	0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 106.106.602.000	Rp. 200.193.398.000			Rp. 306.300.000.000	Rp. 10.000.000.000
1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 500.000.000				Rp. 500.000.000	Rp. 500.000.000
1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 200.000.000	Rp. 800.000.000			Rp. 1.000.000.000	Rp. 10.000.000.000
1	04	03	2.03	0011	Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 100.000.000	Rp. 400.000.000			Rp. 500.000.000	Rp. 5.000.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	04	03	2.03	0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.763.460.000	Rp. 8.236.540.000			Rp. 10.000.000.000	Rp. 10.000.000.000
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)									
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan									
1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 554.002.910	Rp. 10.445.997.090			Rp. 11.000.000.000	Rp. 18.000.000.000
1	04	05	2.01	0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 193.220.641.400	Rp. 453.998.358.600			Rp. 647.219.000.000	Rp. 307.000.000.000
1	04	06			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
1	04	06	2.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil									
1	04	06	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 76.598.500	Rp. 23.401.500			Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
1	04	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
1	04	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
1	04	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 204.077.800	Rp. 45.922.200			Rp. 250.000.000	Rp. 250.000.000
1	04	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 200.000.000
1	04	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 150.000.000
1	04	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 200.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	04	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 73.287.500	Rp. 26.712.500			Rp. 100.000.000	Rp. 150.000.000
1	04	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 150.000.000				Rp. 150.000.000	Rp. 200.000.000
1	04	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 500.000.000				Rp. 500.000.000	Rp. 250.000.000
1	04	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
1	04	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 13.428.349.037				Rp. 13.428.349.037	Rp. 10.862.983.078
1	04	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.258.575.108				Rp. 4.258.575.108	Rp. 4.488.428.500
1	04	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 724.075.200	Rp. 25.924.800			Rp. 750.000.000	Rp. 850.000.000
1	04	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 200.000.000
1	04	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 93.287.500	Rp. 26.712.500			Rp. 120.000.000	Rp. 150.000.000
1	04	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 200.000.000
1	04	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 87.312.000	Rp. 12.688.000			Rp. 100.000.000	Rp. 200.000.000
1	04	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
1	04	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 73.287.500	Rp. 26.712.500			Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
1	04	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 391.411.200	Rp. 1.108.588.800			Rp. 1.500.000.000	Rp. 1.000.000.000
1	04	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1	04	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 400.000.000				Rp. 400.000.000	Rp. 400.000.000
1	04	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 300.000.000				Rp. 300.000.000	Rp. 300.000.000
1	04	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
1	04	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 150.000.000
1	04	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Kutai Timur, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 100.000.000				Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000
Jumlah									Rp. 386.639.409.255	Rp. 678.993.514.890			Rp. 1.065.632.924.145	Rp. 539.333.411.578
									Kab. Kutai Timur, 30 Oktober 2023 Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman					
									H. Ahmad lip Makruf, ST., M.T NIP. 197204181998031008					